

## DAFTAR PUSTAKA

- Artikel non-personal. (2011). Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganUUPPh.pdf> pada tanggal 20 Maret 2012
- Artikel non-personal. (2011). Persandingan UU KUP diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganUUKUP.pdf> pada tanggal 12 April 2012
- Artikel non-personal. (2009). Daftar Objek dan Tarif diakses dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=panduan&page=show&id=141&q=&hlm=> pada tanggal 31 Mei 2012
- Bunga C., Cicha. (2010). *Penerapan Perencanaan Pajak terhadap Penghematan Beban Pajak Terutang Perusahaan (PT. "X")*. Skripsi Strata-1, Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan).
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu.
- Keputusan Dirjen Pajak KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.
- Octaviani, Gracia. (2009). *Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning): Studi Kasus Pada PT "X" di Cimahi*. Skripsi Strata-1, Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan).
- Priantara, Diaz. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/Pj./2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tahun 2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan dibidang Impor atau Kegiatan Usaha dibidang Lain.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Objek dan Besarnya Tarif PPh Pasal 23.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang PPh atas Transaksi Saham di Bursa Efek.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Bunga atau Diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek.
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) beserta Peraturan Pelaksanaannya telah dimuat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri.

- Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.
- Resmi,Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly.(2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT INDEKS.
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor-961/PJ.342/2002 tentang Perlakuan Perpajakan PPh Pasal 26.
- Surat Dirjen Pajak S-1653/PJ.03/2011 tentang Penegasan atas Pelaporan Pemungutan PPh Pasal 22.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-1821/PJ.21/1985 tentang Jawaban Pertanyaan dari Direktorat Jenderal Pertambangan.
- Trianny, Rhenna. (2009). *Analisis Perbandingan Pajak Terutang Perusahaan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak: Studi Kasus Pada CV Puri's Bandung*. Skripsi Strata-1, Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo,.(2011).*Perpajakan Indonesia*. Buku 1, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.